

BAB I

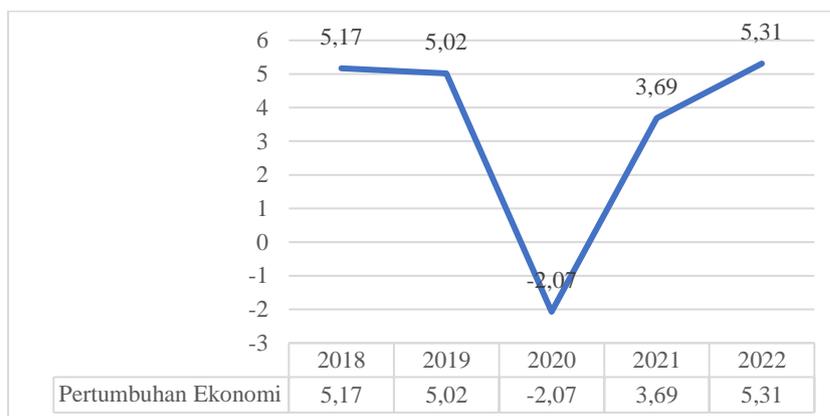
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terpenting dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian suatu negara yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara, selanjutnya pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menjelaskan indikator makro lainnya seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan *output* per kapita dalam jangka panjang, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut maka semakin tinggi juga kemampuan negara itu dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga semakin tinggi juga kemampuan negara tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Sukirno (2010) mengatakan pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang akan diproduksi oleh masyarakat mengalami peningkatan. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto merupakan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan usahanya di suatu domestik atau agregat. Maka dapat disebutkan bahwa

pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi ekonomi dalam waktu yang komprehensif dan terus-menerus, sehingga dapat menghasilkan pendapatan nasional yang semakin besar. Data mengenai pendapatan nasional dapat digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara setiap tahunnya. Nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi pada tahun 2018-2022, berikut grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018-2022:

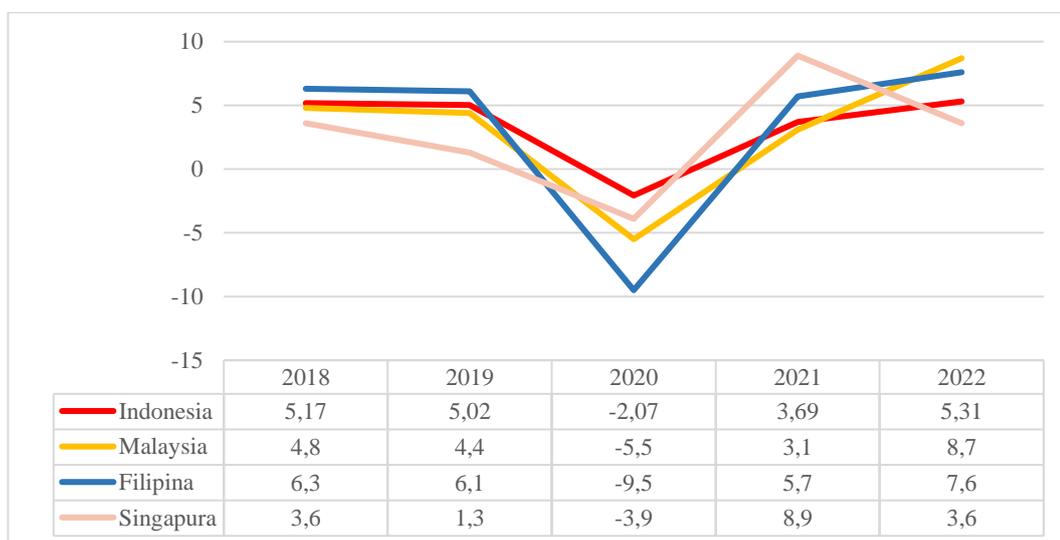


Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018-2022 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1.1, menunjukkan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi yaitu 5,17 persen, lalu terjadi penurunan pada tahun 2019 menjadi 5,02 persen. Pada tahun 2020 angka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi -2,07 persen. Hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 sehingga pemerintah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berdampak pada aktivitas masyarakat yang terbatas

sehingga kegiatan perekonomian juga ikut terhambat. Meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan mencapai 3,69 persen pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya, yakni menjadi 5,31 persen. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terkendali seiring kebijakan vaksinasi. Pada saat terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2020, jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi atau penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan beberapa negara tetangga pada tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Beberapa Negara Tetangga Tahun 2018-2022 (Persen)

Sumber: World Bank (diolah kembali)

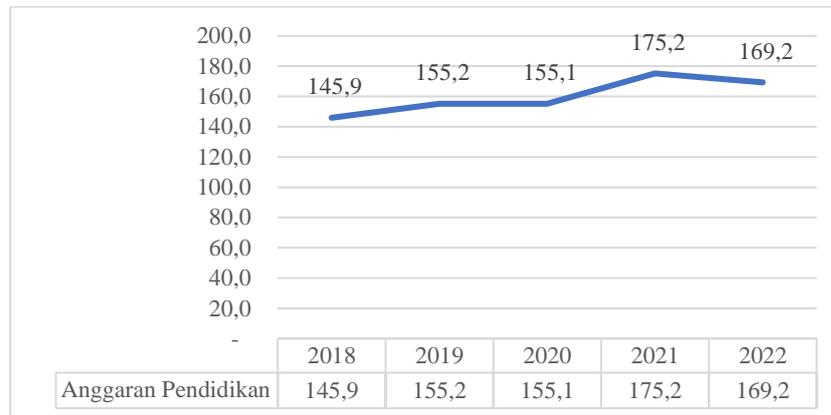
Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang

berkelanjutan. Pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik dan diakui keberadaannya. Pendidikan merupakan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Investasi pada bidang pendidikan tidak hanya bermanfaat untuk perorangan, melainkan juga bagi masyarakat umum. Secara umum dapat dinyatakan bahwa faktor utama yang mendukung proses pembangunan adalah tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas masyarakat tersebut. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain.

Dalam hal ini, salah satu upaya pemerintah untuk menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan yakni pembiayaan pendidikan melalui APBN. Dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, khususnya pada pasal 11 ayat (5) dan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XI/2013, dinyatakan bahwa belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan menjadi per fungsi dan organisasi.

Pengklasifikasian berdasarkan fungsi dibagi menjadi 11 fungsi yang menyangkut beberapa aspek dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diantaranya terdapat fungsi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Berikut grafik anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi pendidikan tahun 2018-2022:



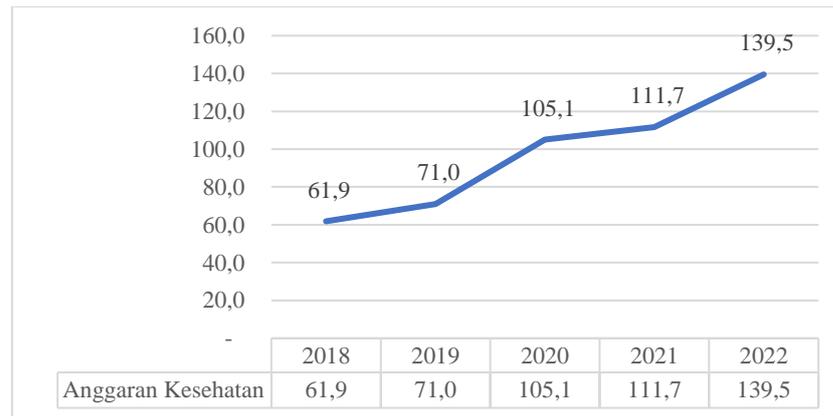
Gambar 1.3 Anggaran Pendidikan Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah kembali)

Gambar 1.3 di atas menunjukkan anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi pendidikan dalam 5 tahun terakhir yang cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018 anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi APBN pendidikan senilai Rp145,9 triliun. Selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp155,2 triliun. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi Rp155,1 triliun. Kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp175,2 triliun dan pada tahun 2022 anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat menurun menjadi Rp169,2 triliun.

Aspek kesehatan juga tidak dapat terlepas dari terciptanya pembangunan serta pertumbuhan ekonomi karena sumber daya manusia merupakan pemeran atau pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh pada tahun 2020 terjadinya krisis kesehatan global yaitu pandemi Covid-19 yang berdampak pada lumpuhnya aktivitas masyarakat sehingga kegiatan ekonomi pun juga tidak berjalan dengan semestinya. Kesehatan merupakan salah satu aspek kesejahteraan yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat dengan kualitas kehidupannya. Pengeluaran pemerintah berupa anggaran kesehatan akan membantu membiayai

tenaga medis dan infrastruktur pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan angka harapan hidup yang nantinya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Berikut grafik anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi kesehatan tahun 2018-2022:



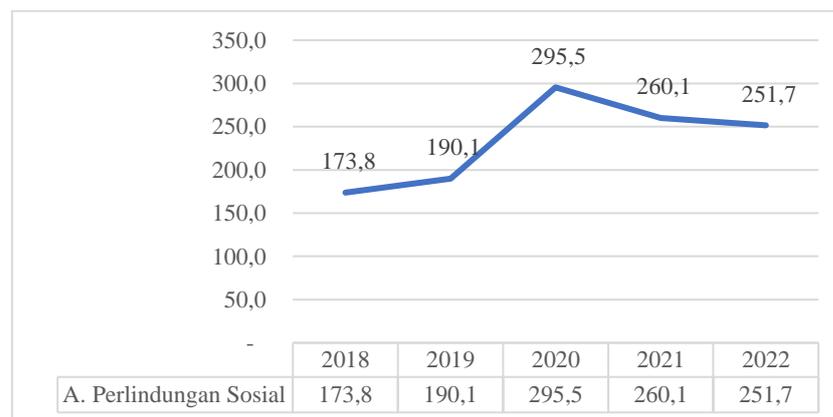
Gambar 1. 4 Anggaran Kesehatan Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah kembali)

Berdasarkan gambar 1.4 di atas, anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang terus meningkat. Pada tahun 2018 anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi APBN kesehatan senilai Rp61,9 triliun. Selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing menjadi Rp71,0 triliun dan Rp105,1 triliun. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp111,7 triliun dan pada tahun 2022 anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat kembali meningkat menjadi Rp139,5 triliun.

Perlindungan sosial merupakan salah satu fungsi APBN yang terdapat dalam anggaran belanja pemerintah pusat. Suharto (2008) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk

miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok yang terpinggirkan. Perlindungan sosial merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan dan pengurangan kesenjangan. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut grafik anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi perlindungan sosial tahun 2018-2022:



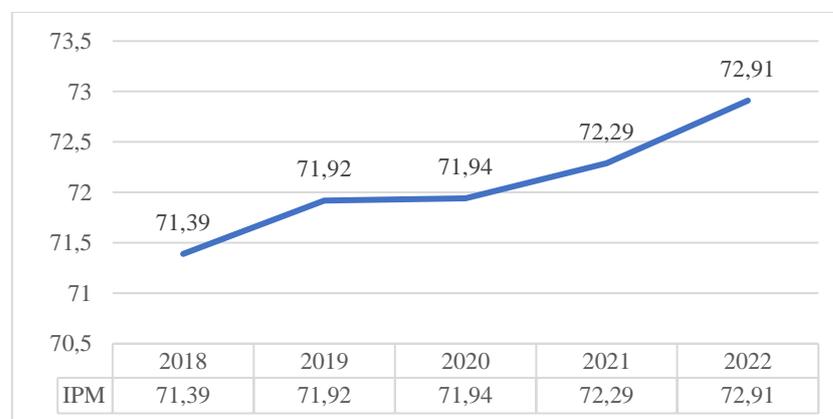
Gambar 1. 5 Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah kembali)

Gambar 1.5 di atas menunjukkan anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi perlindungan sosial dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018 anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi APBN perlindungan sosial senilai Rp173,8 triliun. Selanjutnya meningkat pada tahun 2019 yakni senilai Rp190,1 triliun dan pada tahun 2020

kembali meningkat menjadi Rp295,5 triliun. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp260,1 triliun dan pada tahun 2022 anggaran perlindungan sosial melalui belanja pemerintah pusat menurun menjadi Rp251,7 triliun.

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan. Indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan oleh *Human Development Report* (HDR). Berikut merupakan grafik indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2018-2022:



Gambar 1. 6 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1.6 di atas menunjukkan indeks pembangunan manusia di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang terus meningkat. Pada tahun 2018 indeks pembangunan manusia berada pada angka 71,39. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 71,92 dan pada tahun 2020 kembali

meningkat sebesar 0,02 menjadi 71,94. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 72,29 dan pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia kembali meningkat menjadi 72,91.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022?
2. Bagaimana pengaruh Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian sebagai pengembangan ilmu diharapkan dapat memberikan pengembangan pemikiran dalam memperkaya wawasan pengetahuan khususnya ilmu ekonomi dan dapat menjadi referensi untuk penelitian mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan wawasan mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan yang mempengaruhinya.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk strategi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pertumbuhan ekonomi.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan salah satu acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Indonesia melalui data yang diperoleh dari media internet, dengan mengakses website resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan website resmi Kementerian Keuangan RI untuk memperoleh data.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Jadwal rencana penelitian digambarkan dengan matriks sebagai berikut:

